

PENGEMBANGAN MANAJEMEN KAWASAN EKOWISATA BUDAYA CANDI MUARA TAKUS KAMPAR RIAU

(Development Of Management Area Eco-Cultural Tourism Muara Takus Temple Kampar Riau)

DODI SUKMA¹⁾, SAMBAS BASUNI²⁾ DAN TUTUT SUNARMINTO³⁾

¹⁾Mahasiswa Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor

^{2,3)} Dosen Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB

Email: dodisukma71@gmail.com

Diterima 16 Desember 2016 / Disetujui 10 Februari 2017

ABSTRACT

Muara Takus Temple (MTT) is a relic of the kingdom of Sriwijaya derived from Buddhism and it has the potential to be developed as a tourist attraction. MTT cultural development of the ecotourism area as a cultural heritage, tourist destinations and places of worship need to be done as a measure to keep the MTT area and improve the local economy. If cultural tourism will be managed carefully, it will be had the economic potential as the motivation for the cultural stakeholders to provide rewards and protection of cultural heritage. In other words, cultural tourism has a double significance that is able to increase the economic value and cultural value. The research aimed to develop ecotourism management of cultural MTT. The used method was the method of survey (survey methods) with a questionnaire technique, which was a collection of data that provided a list of questions/statements to the informant/respondent hoped of providing a response to the questionnaire. The used questionnaire was elaborated from the combination question/statement patterned open, closed and scale (rating). The research showed that the parties were supported the development of management area eco-cultural tourism muara takus temple. Eliminating the gaps by establishing an agency has been to manage the MTT in order to avoid overlapping policies and has been facilitated communication, coordination, collaboration parties were involved to achieve the desired objectives.

Keywords: eco-cultural tourism, immaterial, material, muara takus temple

ABSTRAK

Candi Muara Takus (CMT) merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berasal dari agama Buddha dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Pengembangan kawasan ekowisata budaya CMT sebagai cagar budaya, destinasi wisata serta tempat ibadah perlu dilakukan sebagai langkah untuk menjaga kawasan CMT dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Apabila pariwisata budaya dikelola dengan cermat, sehingga memiliki potensi ekonomi yang menjadi motivasi bagi pemangku kebudayaan tersebut untuk memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap warisan budaya. Dengan kata lain, pariwisata budaya mempunyai kebermaknaan ganda yaitu mampu meningkatkan nilai ekonomi dan nilai budaya. Penelitian bertujuan untuk pengembangan manajemen kawasan ekowisata budaya CMT. Metode yang digunakan adalah metode survei (*survey methods*) dengan teknik kuesioner, yaitu suatu pengumpulan data yang memberikan daftar pertanyaan/ Pernyataan kepada informan/responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Kuesioner yang digunakan terelaborasi dari gabungan pertanyaan/ Pernyataan yang berpola terbuka, tertutup dan berskala (*rating*). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa para pihak mendukung pengembangan manajemen kawasan ekowisata CMT. Menghilangkan *gap*/kesenjangan dengan cara membentuk sebuah lembaga untuk mengelola CMT agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan serta memudahkan komunikasi, koordinasi, kolaborasi pihak terkait untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kata kunci: candi muara takus, ekowisata budaya, imaterial, material

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak peninggalan budaya, mulai dari bahasa, kesenian tradisional, tempat tinggal sampai sistem kehidupan di setiap suku berbeda dari Sabang sampai Merauke. Menurut (BPS 2010) ada 1.128 suku yang tersebar dalam 33 provinsi dan keragaman bahasa terbesar di dunia. Sekitar 7.000 bahasa di dunia, 742 bahasa di Indonesia. Jadi dari semua bahasa yang ada di dunia, lebih dari 10% ada di Indonesia. Banyaknya budaya yang ada di Indonesia hanya 17 budaya Indonesia yang telah diakui secara resmi oleh UNESCO. Warisan budaya Indonesia yang diakui dunia adalah: Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Lorentz, hutan hujan tropis, Situs Sangiran, Candi Borobudur, Candi Prambanan, wayang kulit, keris, angklung,

gamelan, batik, noken, subak, sekaten, tari saman serta lumpia (UNESCO 2015).

Perpaduan antara sumberdaya alam dan budaya tersebut, membuat Indonesia berpotensi besar dalam pengembangan *eco-cultural tourism*. Kedua produk ekowisata tersebut saat ini semakin prospektif untuk dikembangkan karena sesuai dengan *trend* pasar pariwisata global yang bergerak ke arah *back to nature* dan *back to local culture*. Pemahaman bahwa *eco-cultural tourism* sebagai alat yang tepat untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan ekologis dan kebudayaan, serta ekonomi masyarakat perlu terus disosialisasikan kepada publik agar menjadi kesadaran bersama dalam menjaga keseimbangan hidup (Avenzora 2008).

Riau memiliki keragaman kebudayaan yang menjadi daya tarik wisata budaya. Contoh daya tarik

wisata budaya yang terdapat di Riau adalah Istana Siak dan Candi Muara Takus. Istana Siak merupakan peninggalan kerajaan Siak Sri Indrapura. Candi Muara Takus merupakan peninggalan budaya yang memuat nilai sejarah dan Purbakala serta keberadaannya tidak terlepas kaitannya dengan Kedatuan Sriwijaya (Depdikbud 1993).

Candi Muara Takus (CMT) merupakan benda cagar budaya yang harus dijaga. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, Situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan (UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya).

Kawasan CMT berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata nasional yang memberi pengetahuan, pengalaman sejarah serta budaya. Manajemen kawasan CMT saat ini masih mendekati agak baik karena masih terjadi tumpang tindih kebijakan. Implementasi manajemen CMT saat ini dimanfaatkan sebagai cagar budaya, destinasi wisata serta tempat ibadah.

Pengembangan kawasan ekowisata budaya CMT sebagai cagar budaya, destinasi wisata serta tempat ibadah perlu dilakukan sebagai langkah untuk menjaga kawasan CMT dan meningkatkan ekonomi masyarakat, sejalan dengan (Damanik 2013) mengatakan bahwa jika pariwisata budaya dikelola dengan cermat, sehingga memiliki potensi ekonomi yang menjadi motivasi bagi pemangku kebudayaan tersebut untuk memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap warisan budaya. Dengan kata lain, pariwisata budaya mempunyai kebermaknaan ganda apabila ia mampu meningkatkan nilai ekonomi sekaligus dengan nilai budaya (Nurrochsyam 2010).

Kawasan CMT dimanfaatkan sebagai cagar budaya, destinasi wisata dan tempat ibadah. Pengelola kawasan ini terdiri atas berbagai *stakeholder*, setiap *Stakeholders* memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing. Semua

Stakeholders beranggapan bahwa kepentingannya merupakan prioritas utama, sehingga menyebabkan tumpang tindih kebijakan. Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan bahwa : (a) merumuskan manajemen CMT sebagai cagar budaya, destinasi wisata dan tempat ibadah (b) mempertemukan kepentingan-kepentingan atau tujuan dari setiap *Stakeholders*. Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu pengembangan manajemen kawasan ekowisata budaya CMT. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : (a) menganalisis implementasi manajemen CMT selaku cagar budaya, destinasi wisata dan tempat ibadah (b) menganalisis persepsi, motivasi, preferensi dan partisipasi yang dimiliki masing-masing pihak terhadap pengembangan CMT (c) menganalisis kategori *Stakeholders* berdasarkan aturan dan implementasi dilapangan. Manfaat penelitian ini yaitu : (a) memberikan pandangan baru dalam Manajemen CMT sesuai dengan kapasitas, tanpa mengurangi manfaat kelestarian ekonomi, ekologi dan sosial budaya sebagai Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Nasional, (b) sebagai landasan bagi pengelola dalam mengambil kebijakan dalam pengelolaan CMT, sehingga pengelolaan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.

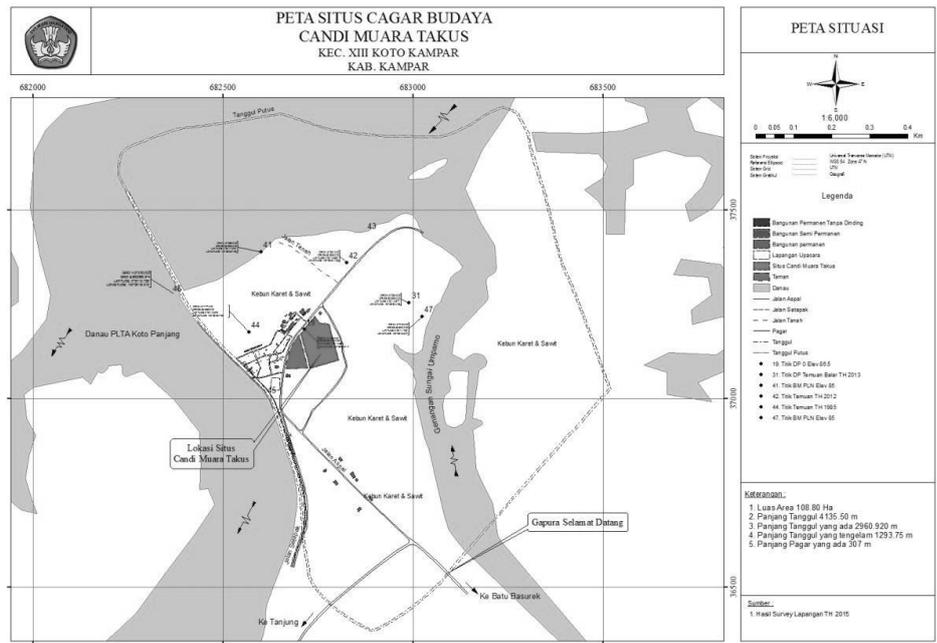
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Muara Takus, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada bulan Januari sampai Maret 2016 (Gambar 1). Penelitian ini dimulai dari Observasi lapangan pada bulan Februari 2015 dan Pengambilan data dimulai dari bulan Januari sampai Maret 2016.

Penelitian ini dilaksanakan melalui *direct face-to-face survei* terhadap wisatawan, pemerintah, masyarakat terlibat langsung dan masyarakat tidak terlibat langsung. Besar ukuran sampel wisatawan berjumlah 30 responden. Informan dalam penelitian ini berjumlah 17 orang dengan metode *purposive sampling* (Tabel 1).

Tabel 1 Sampel penelitian

Sampel	Para pihak	Jumlah sampel	Deskripsi sampel
Responden informan	Wisatawan	30	Pengunjung berjumlah 30 orang wisatawan
	Pemerintah	10	Informan terdiri dari BPCB Sumbar, Disparekraf Riau, Disdikbud Riau, Bappeda Riau, Balitbang Riau, Disparpora Kampar, Disdikbud Kampar, Dishut Kampar, Kec. XIII Koto Kampar dan Kel. Batu Besurat
	Masyarakat terlibat langsung	3	Terdiri dari ahli waris/ Yayasan Matankari, tokoh pemuda dan pedagang souvenir.
	Masyarakat tidak terlibat langsung	4	Terdiri dari dosen ilmu budaya, dosen kehutanan, LAM Riau dan Walubi Riau.



Sumber: BPCB Sumbar (2015)
 Gambar 1 Peta Situs Cagar Budaya Candi Muara Takus

Menganalisis implementasi manajemen wisata di CMT, dengan cara menilai perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) manajemen CMT saat ini berdasarkan kriteria dan indikator yang telah dibangun. Pengukuran persepsi, motivasi, preferensi dan partisipasi menggunakan *analysis one score-one indicator system*, pemberian skor 1 (satu), untuk 1 (satu) indikator, dengan skala yang digunakan adalah 1-7 (Avenzora 2008). Menganalisis *stakeholders* menggunakan *analysis Stakeholders* yang bertujuan untuk membantu dalam upaya mencapai keberhasilan dalam pengelolaan serta membantu penyelesaian masalah yang melibatkan banyak pihak (Bryson 2004). Penilaian kesenjangan menggunakan *gap analysis* yaitu untuk melihat antara keinginan dan kenyataan yang terjadi dilapangan (Parasuraman *et al.* 1985). Maka daripada itu, hasil *analysis Stakeholders* berdasarkan tupoksi/aturan dibandingkan dengan hasil yang terdapat di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kompleks Candi Muara Takus

Muara Takus berasal dari nama sebuah anak sungai kecil bernama takus, anak sungai takus bermuara ke batang kampar kanan. Situs CMT dikelilingi oleh tembok yang berbentuk bujur sangkar berukuran 74 m x 74 m, dengan tinggi tembok lebih kurang 80 cm yang terbuat dari batu putih di luar arealnya terdapat pula tembok tanah berukuran 1,5 Km x 1,5 Km, mengelilingi kompleks ini sampai ke pinggir Sungai Kampar Kanan. Menurut para ahli, jumlah candi keseluruhan berjumlah tujuh buah, sedangkan di kawasan Candi Muara Takus baru terdapat empat gugusan candi yang baru dijumpai yaitu *Candi Tua*, *Candi Bungsu*, *Mahligai* dan *Palangka* (Gambar 2).



Gambar 2 Situs Candi Muara Takus

2. Implementasi Manajemen

Manajemen CMT dari BPCB berjumlah empat orang yang terdiri dari juru rawat, tugasnya berada di dalam pagar menjaga keamanan dan kebersihan, sedangkan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar terdapat lima orang petugas. Tugasnya merumput, menjaga keamanan dan membantu pemungutan retribusi serta dua orang lagi merupakan pegawai negeri sipil yang

merupakan Kepala UPTD dan staf yang ditugaskan di UPTD CMT sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pariwisata Kampar. Sumber dana CMT dikelola bersama yang dananya bersumber dari dana APBD Kampar, APBD Propinsi dan APBN. Hasil penilaian para pihak mengenai implementasi manajemen CMT terdapat pada (Tabel 2).

Tabel 2 Implementasi manajemen para pihak

No	Manajemen	Skor				Rata-rata
		A	B	C	D	
1.	Mampu menyusun pokok-pokok program kegiatan wisata budaya (<i>Planning</i>)	4,80	4,70	3,61	5,50	4,65
2.	Mampu melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas terkait (<i>Actuating</i>)	4,77	4,90	3,56	3,75	4,25
3.	Mampu melakukan peningkatan kapasitas kelompok budaya dalam pengelolaan wisata (<i>Actuating</i>)	4,90	4,90	2,72	4,25	4,19
4.	Mampu mendokumentasikan budaya dan benda-benda peninggalan budaya (<i>Actuating</i>)	4,87	4,90	3,39	5,00	4,54
5.	Mampu meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam pembinaan kelompok budaya (<i>Actuating</i>)	5,00	4,90	4,06	4,00	4,49
6.	Mampu melakukan evaluasi kebijakan pariwisata (<i>Controlling</i>)	4,97	4,90	3,56	4,50	4,48
7.	Mampu melihat kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan dan melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan program (<i>Controlling</i>)	4,90	4,90	3,06	4,25	4,28
Skor Rata-rata		4,90	4,87	3,42	4,46	4,41

Ket: A) Wisatawan B) Pemerintah C) Masyarakat terlibat langsung D) Masyarakat tidak terlibat langsung

Penilaian *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* manajemen kawasan ekowisata budaya CMT mendapatkan skor rata-rata total (4,41), yang terdiri dari wisatawan (4,90) mendekati *agak baik*, pemerintah (4,87) mendekati *agak baik*, masyarakat terlibat langsung (3,42) *agak tidak baik*, dan masyarakat tidak terlibat langsung (4,46) mendekati *agak baik*.

3. Persepsi, Motivasi, Preferensi dan Partisipasi Para Pihak

a. Persepsi manajemen dan potensi kawasan ekowisata CMT

Skor penilaian persepsi manajemen dan potensi kawasan ekowisata CMT para pihak yaitu: wisatawan

(4,71) mendekati *agak baik*, pemerintah (5,10) *agak baik*. Masyarakat terlibat langsung (4,66) mendekati *agak baik*, masyarakat tidak terlibat langsung (4,74) mendekati *agak baik*. Sarwono (2003) mengungkapkan persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, dimana kemampuan tersebut mencakup; kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan dan kemampuan untuk menfokuskan. Perbedaan dalam penilaian dan kepribadian individu yang bersangkutan dimungkinkan karena seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda walaupun objeknya sama (Tabel 3).

Tabel 3 Rata-rata persepsi para pihak

No.	Para pihak	Skor <i>stakeholders</i>
1.	Wisatawan	4,74
2.	Pemerintah	5,10
3.	Masyarakat terlibat langsung	4,66
4.	Masyarakat tidak terlibat langsung	4,74
Rataan		4,81

b. Motivasi pengembangan manajemen kawasan ekowisata CMT

Skor penilaian motivasi pengembangan manajemen kawasan ekowisata CMT para pihak yaitu; wisatawan (5,30) *agak tinggi*, pemerintah (6,46) *tinggi*, masyarakat terlibat langsung (6,38) *tinggi* dan masyarakat tidak terlibat langsung (5,91) mendekati *tinggi*. Skor rata-rata tertinggi motivasi para pihak yaitu dengan nilai (6,01)

tinggi (Tabel 4). Motivasi sangat dibutuhkan karena motivasi merupakan dorongan bagi individu untuk melakukan tindakan yang dianggap akan memberikan kepuasan untuk menjaga stabilitas kejiwaannya (Torkildsen 2002). Upaya ini dilakukan untuk mengajak seluruh pihak yang terkait dalam melindungi dan melestarikan kawasan sehingga keutuhannya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Tabel 4 Rata-rata motivasi para pihak

No.	Para pihak	Skor motivasi
1.	Wisatawan	5,30
2.	Pemerintah	6,46
3.	Masyarakat terlibat langsung	6,38
4.	Masyarakat tidak terlibat langsung	5,91
Rataan		6,01

c. Preferensi pengembangan manajemen kawasan ekowisata CMT

Skor penilaian preferensi pengembangan manajemen kawasan ekowisata CMT para pihak yaitu; wisatawan (5,50) mendekati *tinggi*, pemerintah (6,65) mendekati *tinggi*, masyarakat terlibat langsung (6,50) mendekati *sangat tinggi*, dan masyarakat tidak terlibat langsung (6,56) mendekati *sangat tinggi*. Preferensi para pihak mendapatkan skor rata-rata (6,30) *tinggi* (Tabel 5).

kelompok dalam memandang suatu hal. Menurut (Sugono 2008) preferensi memiliki arti sebagai hak istimewa, pengutamaan, pilihan yang paling disukai, kecenderungan atau hal yang didahulukan dan diprioritaskan, pilihan kecenderungan atau kesukaan dalam menggunakan atau memanfaatkan sesuatu. Atas pengertian tersebut maka preferensi dalam kaitannya dengan keinginan para pihak terhadap pengembangan manajemen ekowisata budaya CMT kedepan.

Preferensi merupakan sesuatu yang menjadi pilihan atau keinginan dari masing-masing individu atau

Tabel 5 Rata-rata preferensi para pihak

No.	Para pihak	Skor preferensi
1.	Wisatawan	5,50
2.	Pemerintah	6,65
3.	Masyarakat terlibat langsung	6,50
4.	Masyarakat tidak terlibat langsung	6,56
Rataan		6,30

d. Partisipasi pengembangan manajemen kawasan ekowisata CMT

Penilaian skor rata-rata partisipasi pengembangan kawasan ekowisata CMT para pihak yang terdiri dari; wisatawan (5,20) *agak tinggi*, pemerintah (6,51) mendekati *sangat tinggi*, masyarakat terlibat langsung

(6,50) *sangat tinggi* dan masyarakat tidak terlibat langsung (5,54) mendekati *tinggi*, seperti yang terdapat pada Tabel 6. Partisipasi para pihak mendapatkan rata-rata skor total penilaian (5,93) mendekati *tinggi* (Tabel 6).

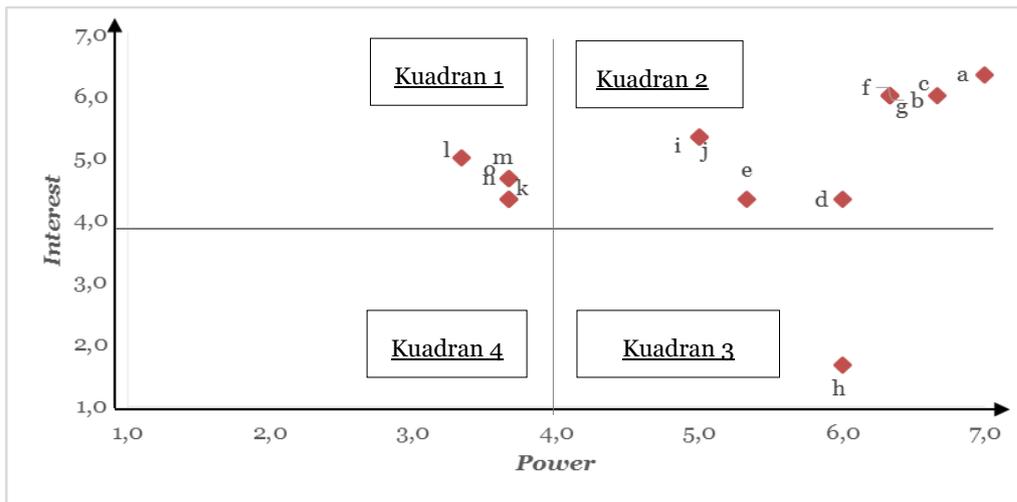
Tabel 6 Partisipasi para pihak

No.	Para pihak	Skor partisipasi
1.	Wisatawan	5,20
2.	Pemerintah	6,51
3.	Masyarakat terlibat langsung	6,50
4.	Masyarakat tidak terlibat langsung	5,54
Rataan		5,93

4. Analisis Stakeholders

Posisi *stakeholders* dalam kuadran menggambarkan posisi dan tanggungjawab yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders* terkait pengembangan manajemen kawasan ekowisata CMT yaitu: (1) *Subject* artinya *Stakeholders* dengan kepentingan tinggi tetapi dengan pengaruh/ kekuatan yang rendah. Adapun *Stakeholders* dari kuadran 1 yaitu: Univ. Lancang Kuning, Walubi Riau, Lembaga Adat Melayu Riau, Organisasi Pemuda, masyarakat dan Yayasan Matankari. (2) *Key Player* berarti *Stakeholders* yang kepentingan

dan kekuatan sama-sama tinggi, adapun *Stakeholders* terdiri dari BPCB Sumbar, Disparekraf Provinsi Riau, Disdikbud Provinsi Riau, Bapeda Provinsi Riau, Dispora Kampar, Disdikbud Kampar, Balitbang Provinsi Riau, Kecamatan. XIII Koto Kampar dan Kelurahan Batu Besurat. (3) *Context setter* artinya bahwa *Stakeholders* memiliki kepentingan rendah namun memiliki kekuatan besar seperti Dinas Kehutanan Kampar. (4) *Crowd* artinya *Stakeholders* dengan kepentingan dan kekuatan yang rendah, namun tidak terdapat pada kuadran 4 (Gambar 3).



Keterangan :

Kuadran 1/ Subject terdiri dari: (k) Univ. Lancang Kuning, (l) Walubi Riau, (m) LAM Riau (n) Organisasi Pemuda dan Masyarakat (o) Yayasan Matankari. Kuadran 2/ Key Player: (a) BPCB Sumbar (b) Disparekraf Riau (c) Disdikbud Riau (d) Bappeda Riau (e) Balitbang Riau (f) Disparpora Kampar (g) Disdikbud Kampar (h) Kec. XIII Koto Kampar (i) Kel. Batu Besurat. Kuadran 3/ Context setter (h) Dishut Kampar.

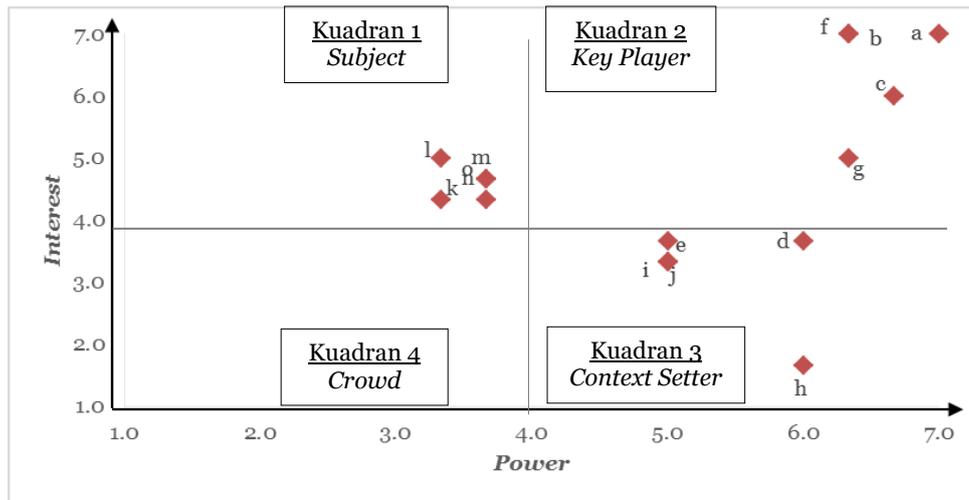
Gambar 3 Kategori *Stakeholders* berdasarkan tupoksi/aturan

Posisi *stakeholders* berdasarkan kondisi dilapangan terkait pengelolaan di Candi Muara Takus. Kuadran 1 yaitu: Univ. Lancang Kuning, Walubi Riau, Lembaga Adat Melayu Riau, Organisasi Pemuda dan Masyarakat dan Yayasan Matankari. Kuadran (2) BPCB Sumbar, Disparekraf Provinsi Riau, Disdikbud Provinsi Riau, Dispora Kampar dan Disdikbud Kampar. Kuadran (3) Bapeda Provinsi Riau, Balitbang Provinsi Riau, Kecamatan. XIII Koto Kampar, Kelurahan Batu Besurat dan Dinas Kehutanan Kampar. Kuadran (4) tidak terdapat *Stakeholders* di kuadran 4 (Gambar 4).

5. Gap Analisis

Hasil analisis kategori *Stakeholders* berdasarkan tupoksi *Key Player* berjumlah sembilan lembaga terdiri

dari BPCB Sumbar, Disparekraf Provinsi Riau, Disdikbud Provinsi Riau, Bapeda Provinsi Riau, Dispora Kampar, Disdikbud Kampar, Balitbang Provinsi Riau, Kecamatan. XIII Koto Kampar dan Kelurahan Batu Besurat. Sedangkan hasil analisis Kategori *Stakeholders* berdasarkan di lapangan *Key Player* berjumlah Lima lembaga terdiri dari BPCB Sumbar, Disparekraf Provinsi Riau, Disdikbud Provinsi Riau, Dispora Kampar, Disdikbud Kampar. Terdapat *gap/kesenjangan* terhadap manajemen kawasan ekowisata CMT sehingga perlu dilakukan pengembangan manajemen dengan cara membentuk sebuah lembaga untuk mengelola CMT agar tidak terjadi tumpah tindih kebijakan serta memudahkan komunikasi, koordinasi, kolaborasi pihak terkait untuk mencapai tujuan yang diinginkan.



Keterangan :

Kuadran 1/ Subject terdiri dari: (k) Univ. Lancang Kuning, (l) Walubi Riau, (m) LAM Riau (n) Organisasi Pemuda dan Masyarakat (o) Yayasan Matankari. Kuadran 2/ Key Player: (a) BPCB Sumbar (b) Disparekraf Riau (c) Disdikbud Riau (f) Disparpora Kampar (g) Disdikbud Kampar Kuadran 3/ Context setter(d) Bappeda Riau (e) Balitbang Riau (h) Dishut Kampar (h) Kec. XIII Koto Kampar (i) Kel. Batu Besurat.

Gambar 4 Kategori Stakeholders berdasarkan di lapangan

6. Opsi Manajemen

Kawasan CMT memiliki potensi baik berupa *material heritage* dan *immaterial heritage*, sehingga di perlukan sebuah lembaga untuk mengelola dan bertanggung jawab dalam manajemen kawasan ekowisata CMT. Lembaga ini sebagai mitra pemerintah untuk membantu menjalankan tugas-tugas dalam program pembangunan dan pengembangan CMT. Mengacu pada pemaparan Hasibuan (2008), lembaga tersebut sebagai suatu organisasi yang dibentuk oleh atau ada hubungannya dengan pemerintah dan atau terdaftar pada Lembaran Negara serta memiliki aturan-aturan formal seperti Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

a. Organisasi lembaga

Susunan organisasi lembaga dan fungsinya masing-masing yang terdiri dari :

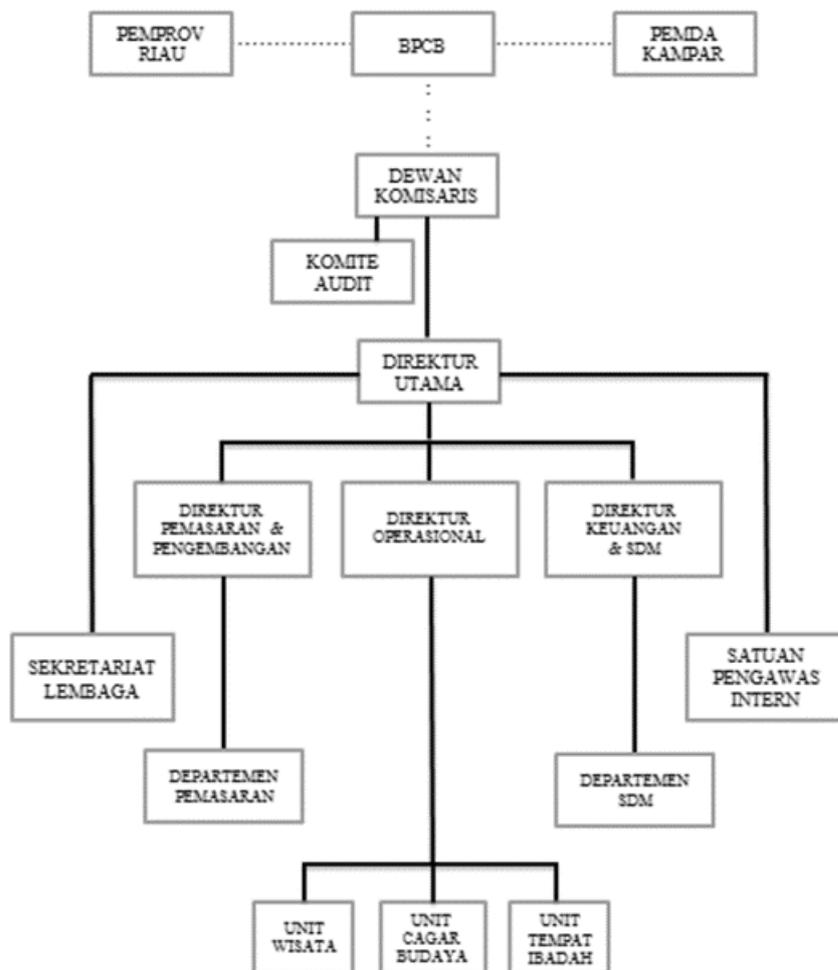
1. Unsur pimpinan berbentuk direksi yang terdiri dari: (1) direktur utama yang bertugas memimpin dan mengurus lembaga sesuai dengan misi dan tujuan perusahaan, (2) direktur operasi dan pengembangan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kerja dalam bidang perencanaan, penelitian, pengembangan pemasaran dan produksi dan (3) direktur administrasi dan keuangan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kerja dalam bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
2. Unsur penunjang pimpinan a. kepala satuan pengawasan intern bertugas melakukan pengawasan dalam rangka mengadakan penilaian atas sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya serta memberikan saran perbaikannya dan bertanggung jawab kepada direktur utama. Kepala satuan

pengawasan internal dibantu oleh: (1) kepala pengawasan operasi, bertugas melakukan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan dan pelaksanaan administrasi dan operasional kantor pusat, kantor unit dan kantor proyek, (2) kepala pengawasan keuangan, bertugas melakukan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan keuangan kantor pusat, kantor unit dan kantor proyek, dan (3) kepala pengawasan khusus, bertugas mengadakan pemeriksaan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan. b. sekretaris lembaga bertugas merencanakan, menyelenggarakan dan mengkoordinir: (1) tugas-tugas yang berkaitan dengan peraturan sistem dan mekanisme tata kerja lembaga dalam arti yang luas, (2) tugas-tugas yang ada hubungannya dengan lembaga-lembaga dan instansi-instansi demi peningkatan kualitas pelayanan, (3) tugas-tugas pemberian saran dan pendapat perihal hukum kepada direksi serta menyajikan informasi manajemen dalam arti luas, (4) tugas-tugas kehumasan, (5) tugas-tugas pembuatan laporan dan pengumpulan data, (6) tugas-tugas membantu kegiatan promosi dan pemasaran, (7) tugas-tugas kerumah tanggaan kantor, (8) tugas-tugas ketatausahaan perkantoran, dan (9) tugas-tugas persertifikatan tanah. Sekretaris lembaga dibantu oleh beberapa bidang yaitu bidang hukum, bidang rumah tangga, bidang laporan dan data, bidang humas serta bidang tata usaha. c. Kepala kantor perwakilan dan pemasaran bertugas memperlancar hubungan kerja dengan instansi-instansi lain, pengelolaan pelayanan akomodasi, membantu promosi dan pemasaran produksi. Kepala kantor perwakilan dan pemasaran dibantu oleh beberapa bidang yaitu bidang

administrasi dan keuangan, bidang pemasaran yang bertugas mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugas operasional yang berkaitan dengan pemasaran, dan bidang hubungan antar lembaga yang bertugas mengkoordinir dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan hubungan lembaga baik pemerintah maupun swasta.

3. Unsur pembantu pimpinan terdiri dari divisi perencanaan penelitian dan pengembangan, divisi keuangan, divisi personalia dan divisi umum.
4. Unsur pelaksana/pengelola unit terdiri dari : unit cagar budaya, unit destinasi wisata dan unit tempat ibadah. Masing-masing unit dipimpin oleh kepala unit yang bertugas melakukan pengelolaan dan mengkoordinir tugas-tugas di lingkungan CMT untuk mencapai tujuan. Kepala unit dibantu oleh: 1) waka unit. 2) seksi pemasaran, bertugas memasarkan produk-produk dan pengelolaan aneka usaha. 3) seksi

operasional, bertugas mengoperasikan produk-produk yang berupa fasilitas-fasilitas taman, konsesi dan museum. 4) seksi pemeliharaan, bertugas melakukan pemeliharaan dan fasilitas-fasilitasnya. 5) seksi administrasi dan keuangan, bertugas melakukan pembukuan keuangan. 6) seksi umum, bertugas menunjang kegiatan kelancaran pekerjaan di kantor yang meliputi kesekretariatan, personalia dan rumah tangga kantor. 7) seksi keamanan, bertugas mengamankan lingkungan dan ikut membantu pengamanan 8) seksi taman, memiliki tugas pokok dalam hal membuat rancangan pengembangan pertamanan. 9) seksi teater dan pentas bertugas mengoperasikan gedung teater dan menyelenggarakan pentas. 10) seksi aneka jasa yang bertugas mengoperasikan dan mengkoordinasi usaha-usaha untuk mencapai tujuan dari perusahaan (Gambar 5).



Gambar 5 Struktur organisasi lembaga CMT

SIMPULAN

Skor rata-rata penilaian para pihak terhadap implementasi manajemen CMT yaitu (4,41) *sedang*, penilaian terdiri dari wisatawan (4,90) mendekati *agak baik*, pemerintah (4,87) mendekati *agak baik*, masyarakat terlibat langsung (3,42) *agak tidak baik* dan masyarakat tidak terlibat langsung (4,46) *sedang*. Skor rata-rata penilaian persepsi, motivasi, preferensi serta partisipasi para pihak terhadap pengembangan CMT yaitu persepsi (4,81) mendekati *agak baik*, motivasi (6,01) *tinggi*, preferensi (6,30) *tinggi*, partisipasi (5,93) mendekati *tinggi*. Terdapat kesenjangan antara kategori *Stakeholders* berdasarkan aturan dan kategori *Stakeholders* berdasarkan implementasi di lapangan. Sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih kepentingan dan kewenangan dari masing-masing lembaga atau pihak terkait. Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu dilakukannya pengembangan manajemen kawasan ekowisata CMT yang berkelanjutan (*sustainable*) serta untuk mengurangi atau menghilangkan *gap/kesenjangan* dengan cara membentuk sebuah lembaga untuk mengelola CMT agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan serta memudahkan komunikasi, koordinasi, kolaborasi pihak terkait untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Avenzora R. 2008. *Ekoturisme-Teori dan Praktek*. Nias (ID): BRR NAD-Nias.
- [BPCB] Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat. 2015. Peta Situs Cagar Budaya Candi Muara Takus. Tidak di Publikasikan.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. *Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- Bryson MJ. 2004. *Stakeholder Identification and Analysis Technique*. Fourth edition. Francis (FR): Routledge.
- Damanik J. 2013. *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- [DEPDIKBUD]. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Gugusan Candi Muara Takus*. Riau (ID): Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hasibuan M. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta (ID): Bumi Aksara.
- Nurrochsyam MW. 2010. Pariwisata budaya. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*. 5(2): 201-208.
- Parasuraman A, Zeithaml VA, Berry LL. 1985. A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. *Journal of Marketing*. 49(1): 42-50.
- [PRI] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- Sarwono SW. 2003. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta (ID): Bulan Bintang.
- Sugono D. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta (ID): Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Torkildsen, G. 2002. *Leisure and recreation management*. Fourth edition. London (GB): Rout.
- [UNESCO] The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *Warisan Budaya Indonesia*. Jakarta (ID). UNESCO.